

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **3.1. Kesimpulan**

Luapan kekesalan masyarakat karena mendapati respon lambat Pemkab Ponorogo bahkan cenderung abai melihat kerusakan infrastruktur jalan yang ada. Apalagi jika melihat kelas jalan tersebut menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten.

Berbagai upaya telah dilakukan masyarakat diantaranya warga desa Jabung, kecamatan Mlarak yang secara swadaya memperbaiki jalan yang seharusnya menjadi kewenangan pemerintah daerah.

Namun karena keterbatasan anggaran dan kemampuan warga hanya bisa memperbaiki jalan apa adanya dan tidak mengacu standar yang ada sehingga cepat rusak kembali.

Jengkel dengan berbagai usaha yang dilakukan dan tak kunjung mendapat respon warga desa Jabung pun beramai-ramai menanami lubang jalan dengan pohon pisang dan menaruh puluhan ikan lele pada setiap kubangan jalan dan memancingnya sebagai bentuk protes. Pun warga juga meluapkan kekecewaan dengan sejumlah tulisan poster bernada kecaman kepada pemerintah setempat.

#### **3.2. Saran**

Pemerintah dalam hal ini Pemkab Ponorogo seharusnya mengutamakan kepentingan dasar masyarakat dewasa ini yang tidak hanya kesehatan dan pendidikan. Namun yang tak kalah penting adalah fasilitas dan infrastruktur, terutama jalan.

Jalan raya menjadi tulang punggung dalam berkegiatan dan menjadi urat nadi ekonomi masyarakat. Sesuai kelas jalan yang dikeluhkan warga jalan antar kecamatan maka kewenangan berada di Pemerintah Kabupaten.

Pemerintah daerah harus pandai dalam kebijakan strategis dan penganggaran terutama soal infrastruktur yang selalu menjadi isu utama masyarakat bumi Reog.

